Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan (E-ISSN 2599-3259)
Volume 7, Nomor 2, Juni 2024
DOI: 10.29408/sosedu.v7i2.36875

# PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN EKOWISATA BALE MANGROVE

**Faizul Hijab[1], Lalu M. Istiqlal[2], Zulkarnain[3]**

[1] Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Hamzanwadi
Email: faezulhijab.student@hamzanwadi.ac.id; istiqlal@hamzanwadi.ac.id;
h.zulkarnainm@hamzanwadi.ac.id

**Artikel histori:**
Submit: 03-06-2024
Revisi: 25-06-2024
Diterima: 27-06-2024
Terbit: 30-06-2024

**Kata Kunci:**
community participation,
mangrove,
ecotourism,
environmental conservation,
Jerowaru

**Korespondensi:**
h.zulkarnainm@hamzanwadi.ac.id

**Abstrak:** This article examines community participation in the conservation of the mangrove environment and the development of community-based ecotourism at Bale Mangrove in Poton Bako Hamlet, Jerowaru Village, East Lombok. The reconstruction is based primarily on the 2024 source manuscript, which describes the research as qualitative descriptive and identifies observation, in-depth interviews, and documentation as the planned data collection techniques. The source document does not contain a separate results chapter; therefore, this article does not invent interview quotations or numerical findings. Instead, it organizes the empirical descriptions already present in the manuscript and connects them with relevant recent studies. The reconstructed analysis highlights five interrelated dimensions: youth-led initiation, community involvement in management, environmental conservation, local economic benefits, and education and product development. The manuscript describes Bale Mangrove as emerging from local youth initiatives and subsequently involving surrounding residents through parking services, small-scale trading, management activities, conservation efforts, and the promotion of local products. These practices indicate that community-based ecotourism can function as a social mechanism that links environmental protection with livelihood opportunities. Nevertheless, the sustainability of the destination depends on continuous participation, institutional coordination, environmental education, monitoring, and equitable distribution of benefits. The article concludes that community participation should be treated not merely as labor support but as a governance mechanism in planning, implementation, evaluation, and benefit sharing.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Hutan mangrove merupakan ekosistem pesisir yang mempunyai fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi sekaligus. Dalam naskah sumber penelitian ini, mangrove ditempatkan sebagai hutan pantai yang berfungsi menjaga kestabilan pantai, melindungi daratan dari gelombang dan abrasi, menyediakan habitat bagi berbagai organisme, serta menyediakan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat. Pemanfaatan mangrove kemudian berkembang tidak hanya melalui hasil hutan bukan kayu, tetapi juga melalui jasa lingkungan dan pariwisata. Perkembangan ekowisata menjadi penting karena dapat mempertemukan kebutuhan konservasi dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sumber pendapatan.

Konteks tersebut tampak di Dusun Poton Bako, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, tempat masyarakat mengembangkan Ekowisata Bale Mangrove. Naskah sumber menyebutkan bahwa gagasan pengembangan wisata muncul dari para pemuda setempat yang melihat potensi hutan mangrove yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu tokoh yang disebut sebagai penggagas adalah Lukmanul Hakim. Inisiatif pemuda tersebut kemudian diarahkan untuk mengajak masyarakat, khususnya kelompok pemuda, bergerak bersama membangun kawasan wisata. Dalam waktu relatif singkat, destinasi tersebut digambarkan mengalami perkembangan dan menarik wisatawan terutama pada akhir pekan.

Perkembangan Bale Mangrove tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya daya tarik wisata. Naskah sumber juga menggambarkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar, antara lain melalui pemanfaatan lahan sebagai tempat parkir dan aktivitas berjualan di sekitar kawasan. Pengembangan wisata juga membuka ruang bagi produk lokal seperti kopi mangrove, miniatur sampan atau perahu, dan pakaian khas wisata. Dengan demikian, pariwisata berbasis masyarakat tidak dipahami semata-mata sebagai kegiatan mendatangkan wisatawan, tetapi sebagai proses sosial yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor dalam pengelolaan sumber daya dan penerima manfaat.

Persoalan yang kemudian penting dikaji adalah bagaimana partisipasi masyarakat tersebut dibangun dan diarahkan agar pengembangan wisata tidak mengurangi fungsi ekologis mangrove. Partisipasi dalam konteks ini mencakup keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil. Konsep ini sejalan dengan pandangan pariwisata berbasis masyarakat yang menekankan kontrol masyarakat lokal, pemberdayaan, distribusi manfaat yang adil, dan perlindungan lingkungan. Penelitian mutakhir juga menunjukkan bahwa pengelolaan ekowisata mangrove berbasis masyarakat dapat memperkuat kesadaran konservasi sekaligus membuka peluang ekonomi lokal (Singgalen, 2020; Nuraeni & Kusum, 2023; Pelenkahu et al., 2023).

Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak cukup diukur dari kehadiran dalam kegiatan. Partisipasi perlu dilihat dari posisi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan manfaat, dan evaluasi. Di beberapa lokasi, keterlibatan masyarakat berkembang melalui organisasi lokal, kelompok pemuda, kelompok pengelola, dan dukungan pemerintah. Karena itu, kajian mengenai Bale Mangrove menjadi relevan untuk memahami bagaimana

inisiatif lokal dapat berkembang menjadi tata kelola wisata yang menghubungkan konservasi dan kesejahteraan.

Berdasarkan konteks tersebut, fokus penelitian dalam naskah sumber adalah dua hal. Pertama, strategi masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengembangan wisata mangrove berbasis masyarakat di Dusun Poton Bako. Kedua, partisipasi masyarakat dalam menjaga pelestarian lingkungan dan pengembangan wisata mangrove berbasis masyarakat. Artikel ini mempertahankan kedua fokus tersebut, tetapi merekonstruksi penyajiannya menjadi format artikel jurnal dengan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai mekanisme utama yang menghubungkan pelestarian lingkungan, pengelolaan destinasi, dan manfaat ekonomi lokal.

## KAJIAN LITERATUR

### Pariwisata Berbasis Masyarakat dan Partisipasi

Pariwisata berbasis masyarakat menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian penting dari proses pembangunan destinasi. Dalam kerangka yang dikutip dalam naskah sumber, masyarakat lokal dapat terlibat langsung dalam kegiatan kepariwisataan dan memperoleh peluang untuk mengembangkan kapasitas dalam pemasaran, penjualan, dan pengelolaan pendapatan. Produk yang dapat dikembangkan masyarakat tidak terbatas pada jasa pemanduan, tetapi juga transportasi, penyediaan makanan, akomodasi, kerajinan, dan pertunjukan budaya. Pendekatan ini memperluas pengertian partisipasi dari sekadar menjadi tenaga kerja menjadi kepemilikan, kontrol, dan pengambilan keputusan.

Murphy (1988) menempatkan masyarakat lokal dan keunikan sumber daya masyarakat sebagai penggerak kegiatan wisata. Dalam perspektif tersebut, pembangunan pariwisata tidak seharusnya berjalan terpisah dari sumber daya sosial masyarakat. Sementara itu, Suansri (2003) menekankan dimensi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Kelima dimensi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan destinasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah wisatawan, tetapi juga oleh kualitas hidup, keadilan pembagian peran, pelestarian budaya, daya dukung lingkungan, dan kekuatan masyarakat dalam mengelola sumber daya.

Penelitian empiris di Indonesia memperlihatkan pola yang sejalan. Singgalen (2020) menunjukkan bahwa pemanfaatan mangrove melalui ekowisata berbasis masyarakat dapat berkaitan dengan keberlanjutan mata pencaharian. Sari et al. (2020) menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan wisata mangrove dapat bergantung pada peran masyarakat dan dukungan kebijakan. Penelitian Rahmawati dan Cintamulya (2020) juga menempatkan partisipasi masyarakat sebagai faktor penting dalam pengelolaan lingkungan ekowisata. Temuan-temuan tersebut memperkuat argumen bahwa pengembangan wisata mangrove harus dibaca sebagai proses sosial-ekologis, bukan hanya sebagai pengembangan objek wisata.

Studi yang lebih baru memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat berfungsi sebagai instrumen konservasi. Nuraeni dan Kusum (2023) menemukan bahwa model pariwisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai biologi mangrove dan mendukung kegiatan restorasi sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi. Pelenkahu et al. (2023) menunjukkan adanya partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi dalam pengelolaan wisata mangrove. Sementara itu, studi tentang pengembangan kawasan mangrove di Karangsong menunjukkan

bahwa penilaian keberlanjutan perlu menggabungkan dimensi ekologis, ekonomi, sosial, dan kelembagaan (2024). Dengan demikian, partisipasi merupakan unsur yang menghubungkan berbagai dimensi keberlanjutan tersebut.

**Pelestarian Lingkungan Mangrove**

Pelestarian mangrove dalam naskah sumber mencakup perlindungan dan rehabilitasi. Perlindungan dapat dilakukan dengan menjaga kawasan konservasi, membangun kesadaran masyarakat, mengendalikan sampah, mencegah kegiatan yang merusak, dan menyediakan infrastruktur wisata yang ramah lingkungan. Rehabilitasi diarahkan pada penanaman kembali mangrove yang rusak atau hilang. Pendekatan ini menegaskan bahwa aktivitas wisata harus berlangsung dalam batas daya dukung ekosistem.

Ekowisata mempunyai posisi strategis karena aktivitas wisata dapat menjadi sarana pendidikan lingkungan. Ketika wisatawan dan masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai fungsi mangrove, nilai ekologis tersebut dapat diperkuat melalui pengalaman langsung. Namun, aktivitas wisata juga dapat menimbulkan tekanan apabila pembangunan fasilitas, pengelolaan sampah, lalu lintas pengunjung, atau penggunaan ruang tidak dikendalikan. Karena itu, pelestarian membutuhkan aturan, pemantauan, dan pembagian peran yang jelas antara masyarakat, pengelola, pemerintah desa, dan pihak lain yang berkepentingan.

Dalam perspektif struktural fungsional yang digunakan dalam naskah sumber, masyarakat dipahami sebagai sistem sosial yang terdiri atas unsur-unsur yang memiliki fungsi tertentu. Pelestarian dan pengembangan wisata dapat berjalan relatif stabil apabila berbagai unsur tersebut menjalankan peran dan berkoordinasi. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa kelompok pemuda, masyarakat sekitar, pengelola, pemerintah desa, dan pelaku usaha lokal perlu dilihat sebagai bagian dari satu sistem pengelolaan. Namun, artikel ini juga menempatkan partisipasi dan distribusi manfaat sebagai isu penting agar keteraturan sosial tidak hanya berarti pembagian tugas, tetapi juga keterlibatan yang bermakna.

**METODE PENELITIAN**

PenelitianNaskah sumber menyatakan bahwa penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dinamika sosial dalam pengembangan wisata mangrove di Dusun Poton Bako, Desa Jerowaru. Data direncanakan diperoleh melalui pengamatan terhadap lingkungan fisik, biologis, dan sosial, wawancara mendalam dengan informan kunci dan tambahan, serta studi dokumentasi. Informan kunci yang disebut dalam naskah meliputi kepala desa, pengelola mangrove, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar; sedangkan anggota kelompok mangrove ditempatkan sebagai informan tambahan.

Lokasi penelitian adalah kawasan mangrove di Dusun Poton Bako, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Naskah menyebutkan pelaksanaan penelitian dimulai pada Desember 2023. Data primer dimaknai sebagai data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari buku, catatan, arsip, dan dokumen yang relevan. Studi dokumen diarahkan pada foto, video, gambar, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kawasan ekowisata.

Analisis data dalam naskah sumber mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam rekonstruksi artikel ini, tahapan tersebut diterjemahkan menjadi tiga proses analitis: pertama, mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan strategi pelestarian, bentuk partisipasi, pengelolaan wisata, dan manfaat bagi masyarakat; kedua, mengelompokkan informasi tersebut ke dalam tema; dan ketiga, menghubungkan tema-tema tersebut untuk menjelaskan hubungan antara partisipasi masyarakat, konservasi, pengembangan destinasi, dan kesejahteraan lokal.

Catatan penting mengenai sumber: PDF yang tersedia berhenti pada bagian metode penelitian dan tidak memuat bab hasil penelitian serta kesimpulan skripsi. Oleh karena itu, artikel ini tidak membuat kutipan wawancara, jumlah informan, persentase partisipasi, atau temuan numerik yang tidak tersedia dalam sumber. Bagian hasil dan pembahasan hanya mengorganisasikan deskripsi empiris yang sudah tertulis dalam naskah sumber—misalnya inisiatif pemuda, manfaat ekonomi, aktivitas pengelolaan, dan peningkatan kesadaran—serta mengaitkannya dengan literatur pendukung. Penambahan literatur mutakhir digunakan untuk memperkuat analisis, bukan untuk menggantikan data lapangan yang tidak tersedia dalam PDF.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Inisiatif Pemuda sebagai Titik Awal Pengembangan Bale Mangrove

Deskripsi dalam naskah sumber menunjukkan bahwa pengembangan Bale Mangrove bermula dari kesadaran pemuda terhadap potensi hutan mangrove yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Lukmanul Hakim disebut sebagai salah satu penggagas atau pelopor yang mengajak pemuda untuk bergerak bersama dan mengajak masyarakat sekitar. Pola tersebut menunjukkan bahwa inisiatif lokal menjadi modal sosial awal dalam pembentukan destinasi. Pengembangan wisata tidak dimulai dari proyek eksternal yang sepenuhnya dirancang dari luar komunitas, tetapi dari aktor lokal yang mengenali potensi lingkungan tempat tinggalnya.

Dari perspektif partisipasi, inisiatif pemuda penting karena menjadi pintu masuk menuju keterlibatan masyarakat yang lebih luas. Pemuda memiliki posisi strategis sebagai penggerak karena relatif dekat dengan komunikasi sosial, promosi, dan penggunaan media. Akan tetapi, keberlanjutan inisiatif tidak dapat hanya bergantung pada kelompok penggagas. Ketika destinasi mulai berkembang, diperlukan mekanisme yang memungkinkan masyarakat lain masuk dalam struktur pengelolaan, memperoleh peran, dan memahami tanggung jawab konservasi.

Pola ini sejalan dengan temuan Arrahmah dan Wicaksono mengenai dinamika partisipasi masyarakat dalam tata kelola ekowisata mangrove, bahwa partisipasi berkembang melalui tahapan respons lokal dan proses pelembagaan. Dengan demikian, inisiatif pemuda dapat dipandang sebagai tahap awal yang perlu dilanjutkan dengan pembentukan kelembagaan, aturan pengelolaan, pembagian tugas, dan evaluasi.

### 2. Strategi Pelestarian Lingkungan dalam Pengembangan Wisata

Naskah sumber mengidentifikasi beberapa strategi yang relevan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan wisata mangrove, yaitu rehabilitasi mangrove, pengelolaan sampah, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, penegakan aturan, serta perlindungan

satwa. Strategi tersebut menunjukkan bahwa pelestarian tidak ditempatkan sebagai kegiatan tambahan setelah wisata berkembang, tetapi sebagai bagian dari tata kelola destinasi.

Rehabilitasi penting terutama ketika kawasan mangrove mengalami kerusakan atau kehilangan vegetasi. Pengelolaan sampah juga menjadi isu penting karena peningkatan jumlah pengunjung dapat meningkatkan volume sampah. Dalam konteks wisata berbasis masyarakat, kedua kegiatan tersebut membutuhkan partisipasi langsung warga. Masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan penanaman, pembersihan, pengawasan, edukasi wisatawan, dan penyampaian informasi mengenai perilaku yang diperbolehkan di kawasan mangrove.

Pembangunan fasilitas juga harus mempertimbangkan karakteristik ekosistem. Naskah sumber menyebutkan contoh fasilitas berupa jembatan kayu atau jalur berjalan yang memungkinkan wisatawan menikmati mangrove tanpa merusak ekosistem. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur wisata harus berfungsi ganda: meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus membatasi tekanan terhadap kawasan. Dalam studi Karangsong, aspek infrastruktur dan daya tarik memang berkaitan dengan keberlanjutan, tetapi pengembangannya perlu didukung perencanaan ruang dan koordinasi kelembagaan. Konservasi juga membutuhkan pendidikan. Pendidikan lingkungan membuat masyarakat dan wisatawan memahami mengapa mangrove perlu dipertahankan. Nuraeni dan Kusum (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam wisata berbasis mangrove dapat meningkatkan pengetahuan ekologis dan mendukung restorasi. Dengan demikian, pendidikan bukan sekadar kegiatan pendukung, tetapi instrumen untuk mengubah partisipasi menjadi perilaku konservasi yang berkelanjutan.

**3. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Destinasi**

Berdasarkan deskripsi yang tersedia dalam naskah, partisipasi masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk: keterlibatan dalam pembangunan kawasan, pengelolaan wisata, kegiatan ekonomi, pemeliharaan lingkungan, dan dukungan terhadap promosi destinasi. Naskah juga menempatkan masyarakat sebagai pihak yang dapat terlibat dalam pemeliharaan, pengelolaan, perencanaan, bahkan pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipasi yang diharapkan bukan hanya partisipasi fisik, tetapi juga partisipasi dalam proses pengelolaan.

Pada tahap pembangunan, masyarakat dapat dilibatkan dalam pengerjaan proyek dan pemantauan. Pemantauan diarahkan untuk melihat tugas pokok, kendala yang dihadapi, dan jangka waktu evaluasi. Pada tahap pengelolaan, aspek yang perlu diperhatikan meliputi kedudukan dalam organisasi, peran dalam pengelolaan, dan jumlah objek yang dikelola. Struktur semacam ini penting karena destinasi wisata merupakan sistem kerja yang membutuhkan pembagian peran dan koordinasi.

Partisipasi juga terlihat melalui aktivitas ekonomi. Naskah sumber menyebut pemanfaatan lahan parkir dan kegiatan berjualan di sekitar kawasan sebagai sumber pendapatan. Produk lokal seperti kopi mangrove, miniatur perahu, dan pakaian khas wisata dapat dikembangkan sebagai bagian dari rantai nilai destinasi. Dalam perspektif community-based tourism, manfaat ekonomi merupakan salah satu alasan penting mengapa masyarakat mendukung keberadaan wisata, tetapi manfaat tersebut perlu dikelola secara adil agar tidak menimbulkan kesenjangan

antara kelompok yang terlibat langsung dan masyarakat yang tidak terlibat langsung.

Penelitian tentang kawasan mangrove di berbagai daerah memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dapat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi. Karena itu, untuk Bale Mangrove, ukuran keberhasilan partisipasi sebaiknya tidak hanya dilihat dari banyaknya warga yang bekerja pada saat kegiatan, tetapi dari sejauh mana masyarakat memiliki ruang untuk menentukan arah pengembangan, mengawasi pengelolaan, memperoleh manfaat, dan terlibat dalam evaluasi.

Tabel 1. Bentuk partisipasi dan strategi pengelolaan yang teridentifikasi

| **Aspek** | **Bentuk yang dideskripsikan dalam naskah** | **Makna dalam pengelolaan berbasis masyarakat** |
|---|---|---|
| Inisiatif lokal | Pemuda mengidentifikasi potensi mangrove dan mengajak masyarakat bergerak bersama. | Modal sosial dan kepemimpinan lokal menjadi titik awal pengembangan. |
| Perencanaan dan pembangunan | Masyarakat dilibatkan dalam pengerjaan dan pemantauan pembangunan kawasan. | Mendorong rasa memiliki dan kontrol sosial terhadap destinasi. |
| Pengelolaan | Pembagian kedudukan dan peran dalam organisasi pengelola. | Memperjelas tanggung jawab dan koordinasi. |
| Konservasi | Rehabilitasi, pengelolaan sampah, edukasi, perlindungan satwa, dan pengawasan. | Menghubungkan aktivitas wisata dengan keberlanjutan ekosistem. |
| Ekonomi lokal | Parkir, berjualan, dan pengembangan produk lokal. | Membuka peluang pendapatan dan memperluas manfaat wisata. |
| Pendidikan dan pelatihan | Pelatihan/workshop serta penyampaian pengetahuan lingkungan. | Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kesadaran konservasi. |

**4. Manfaat Ekonomi dan Penguatan Kesejahteraan Lokal**

Salah satu argumen utama dalam naskah sumber adalah bahwa keberadaan Bale Mangrove memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Lahan parkir menjadi salah satu sumber pendapatan, sedangkan aktivitas berjualan di sekitar kawasan membuka peluang usaha. Produk lokal yang disebutkan dalam naskah memperlihatkan bahwa masyarakat dapat memperoleh manfaat tidak hanya dari tiket atau jasa utama wisata, tetapi juga dari kegiatan ekonomi yang tumbuh di sekitar destinasi.

Manfaat ekonomi mempunyai fungsi sosial dalam mempertahankan dukungan masyarakat terhadap konservasi. Apabila masyarakat melihat hubungan yang jelas antara perlindungan mangrove dan sumber penghidupan, insentif sosial untuk menjaga kawasan menjadi lebih kuat. Sebaliknya, apabila manfaat hanya dinikmati oleh pengelola tertentu sementara beban konservasi ditanggung oleh masyarakat luas, dukungan dapat melemah. Karena itu, prinsip distribusi manfaat merupakan bagian penting dari pariwisata berbasis masyarakat.

Studi Singgalen (2020) memperlihatkan bahwa pemanfaatan mangrove melalui ekowisata berbasis masyarakat dapat berhubungan dengan mata pencaharian berkelanjutan. Penelitian Nuraeni dan Kusum (2023) juga memperlihatkan bahwa kegiatan wisata berbasis masyarakat dapat menghasilkan produk dan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat konservasi. Temuan tersebut memperkuat arah

analisis Bale Mangrove bahwa nilai ekonomi dan nilai ekologis sebaiknya dibangun sebagai dua sisi yang saling mendukung, bukan sebagai tujuan yang saling bertentangan.

**5. Kelembagaan, Pendidikan, dan Pengembangan Produk Wisata**

Keberlanjutan pengelolaan membutuhkan kelembagaan. Naskah sumber menyebut perlunya lembaga atau organisasi yang melakukan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dengan pengelolaan oleh masyarakat sekitar dan fungsi penasihat atau pengawasan dari pemerintah maupun pihak lain. Struktur tersebut dapat menjadi ruang koordinasi antara masyarakat, pengelola, pemerintah desa, dan pihak pendukung.

Kelembagaan juga penting untuk menjaga keberlanjutan ketika antusiasme awal mulai menurun. Aturan mengenai tugas, pembagian peran, evaluasi, pengelolaan pendapatan, pemeliharaan fasilitas, dan perlindungan lingkungan perlu dikembangkan secara terbuka. Dalam kerangka community-based tourism, kontrol masyarakat terhadap pengelolaan menjadi penting karena masyarakat bukan hanya objek yang menerima dampak pembangunan, tetapi subjek yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan sumber daya.

Pendidikan dan pelatihan merupakan strategi lain yang ditekankan dalam naskah. Fasilitas pelatihan dapat ditujukan kepada masyarakat lokal, wisatawan, dan pelajar untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengembangan wisata mangrove. Program konservasi dan penelitian juga dapat membantu pengelola memahami kondisi ekologi kawasan. Sementara itu, pengembangan produk wisata—seperti makanan, minuman, dan suvenir berbahan lokal—dapat memperluas manfaat ekonomi.

Pendekatan tersebut sesuai dengan studi terbaru yang menekankan bahwa pengelolaan ekowisata mangrove memerlukan kombinasi partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan, konservasi, dan pengembangan ekonomi. Dalam konteks Bale Mangrove, pengembangan produk sebaiknya tidak sekadar mengejar penjualan, tetapi juga membawa identitas lokal dan pesan konservasi sehingga produk wisata ikut menjadi media pendidikan lingkungan.

**6. Analisis Struktural Fungsional terhadap Partisipasi Masyarakat**

Naskah sumber menggunakan teori struktural fungsional sebagai teori analisis. Perspektif ini memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas unsur-unsur yang memiliki fungsi dan saling berkaitan. Dalam konteks Bale Mangrove, pemuda, masyarakat sekitar, pengelola, pemerintah desa, pelaku usaha, dan wisatawan dapat dipahami sebagai unsur yang mempunyai posisi berbeda tetapi berhubungan dalam sistem destinasi.

Fungsi manifes dari pengembangan wisata adalah menyediakan ruang rekreasi, menciptakan aktivitas ekonomi, dan memperkenalkan potensi mangrove. Di sisi lain, terdapat fungsi yang lebih luas berupa peningkatan kesadaran lingkungan, penguatan interaksi sosial, dan terbentuknya pengalaman kolektif masyarakat dalam mengelola sumber daya. Namun, perspektif struktural fungsional juga mengingatkan bahwa sistem membutuhkan keseimbangan. Apabila salah satu unsur tidak menjalankan perannya, misalnya pengelolaan sampah tidak berjalan atau pembagian manfaat tidak jelas, stabilitas pengelolaan dapat terganggu.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai mekanisme integrasi sistem. Partisipasi memungkinkan masyarakat tidak hanya menjalankan

fungsi tertentu, tetapi juga menghubungkan berbagai fungsi. Ketika masyarakat terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, konservasi, dan kegiatan ekonomi, aktivitas wisata menjadi lebih terintegrasi dengan kehidupan sosial setempat. Perspektif ini menjelaskan mengapa keberhasilan Bale Mangrove membutuhkan kerja bersama, bukan hanya kinerja satu kelompok pengelola.

Meskipun demikian, penggunaan perspektif struktural fungsional perlu dilengkapi dengan perhatian terhadap distribusi manfaat dan ruang pengambilan keputusan. Pariwisata berbasis masyarakat mensyaratkan pemberdayaan dan distribusi manfaat yang adil. Karena itu, keseimbangan sistem tidak cukup dipahami sebagai tidak adanya konflik, tetapi sebagai kemampuan masyarakat untuk mengelola perbedaan kepentingan melalui aturan, komunikasi, dan mekanisme partisipatif.

**7. Model Rekonstruksi Pengelolaan Bale Mangrove Berbasis Masyarakat**

Dari keseluruhan deskripsi dalam naskah, pengelolaan Bale Mangrove dapat direkonstruksi sebagai siklus partisipasi yang terdiri atas inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, konservasi, pemanfaatan, dan evaluasi. Inisiasi muncul dari pemuda dan kesadaran terhadap potensi lokal. Perencanaan kemudian membutuhkan keterlibatan masyarakat dan pihak pengelola. Pelaksanaan mencakup pembangunan fasilitas, pengelolaan destinasi, dan kegiatan ekonomi. Konservasi berjalan melalui rehabilitasi, pengelolaan sampah, pendidikan, dan perlindungan kawasan. Pemanfaatan menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial, sedangkan evaluasi menjaga agar seluruh proses tetap sejalan dengan keberlanjutan.

Siklus tersebut menempatkan partisipasi sebagai proses yang berulang. Masyarakat tidak cukup dilibatkan hanya ketika pembangunan awal berlangsung. Setelah destinasi berjalan, masyarakat perlu memperoleh ruang untuk mengevaluasi dampak wisata, mengusulkan perubahan, dan menentukan prioritas. Prinsip ini sejalan dengan penelitian Pelenkahu et al. (2023) yang menunjukkan pentingnya partisipasi pada berbagai tahap pengelolaan, serta penelitian Handayani et al. yang menekankan kepedulian, keterlibatan, keterampilan, pendapatan, dan kepercayaan sebagai unsur partisipasi dalam konservasi mangrove.

Dengan demikian, strategi utama pengembangan Bale Mangrove bukan sekadar memperbanyak fasilitas atau wisatawan, tetapi membangun kapasitas sosial untuk mengelola pertumbuhan wisata. Semakin besar aktivitas wisata, semakin besar pula kebutuhan akan aturan lingkungan, pengelolaan sampah, koordinasi kelembagaan, pembagian manfaat, dan pendidikan konservasi. Di titik inilah ekowisata berbasis masyarakat memperoleh maknanya: wisata menjadi sarana untuk memperkuat hubungan masyarakat dengan sumber daya alam sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang dapat mempertahankan dukungan terhadap konservasi.

**8. Tantangan dan Arah Penguatan Partisipasi**

Meskipun naskah sumber menggambarkan perkembangan Bale Mangrove secara positif, pengembangan wisata berbasis masyarakat tidak otomatis menjamin keberlanjutan. Pertumbuhan jumlah pengunjung dapat meningkatkan kebutuhan fasilitas, pengelolaan sampah, keamanan, dan pelayanan. Pada saat yang sama, semakin banyak aktivitas ekonomi di sekitar kawasan dapat menambah tekanan terhadap ruang pesisir. Karena itu, peningkatan kunjungan harus berjalan seiring

dengan peningkatan kapasitas pengelolaan. Dalam kerangka ini, keberhasilan tidak semata-mata ditandai oleh ramainya destinasi, tetapi oleh kemampuan komunitas mempertahankan kualitas lingkungan dan manfaat sosial-ekonomi secara bersamaan.

Tantangan kelembagaan juga perlu diperhatikan. Ketika pengelolaan dilakukan oleh masyarakat, pembagian tugas harus jelas dan mekanisme pengambilan keputusan harus dapat dipahami oleh anggota komunitas. Organisasi pengelola perlu mempunyai aturan mengenai pemeliharaan fasilitas, kebersihan, pengawasan lingkungan, pengelolaan pendapatan, dan penyelesaian persoalan. Pemerintah desa dapat berperan sebagai fasilitator dan penghubung dengan program pembangunan, tetapi kontrol terhadap pengelolaan tetap perlu memberi ruang yang cukup bagi masyarakat lokal. Pola ini sejalan dengan prinsip community-based tourism yang menempatkan kontrol dan manfaat masyarakat sebagai unsur penting.

Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa partisipasi tidak berhenti pada kelompok yang paling aktif. Naskah sumber menekankan keterlibatan masyarakat secara luas, sehingga kelompok perempuan, generasi tua, pemuda, pelaku usaha kecil, dan warga yang tidak terlibat langsung dalam operasional wisata perlu mempunyai akses terhadap informasi dan manfaat. Distribusi manfaat yang lebih luas dapat memperkuat legitimasi sosial destinasi. Sebaliknya, jika hanya sebagian kecil masyarakat yang memperoleh keuntungan, maka wisata dapat dipersepsikan sebagai kegiatan kelompok tertentu dan bukan sebagai aset bersama desa.

Penguatan partisipasi juga membutuhkan indikator yang lebih terukur untuk penelitian lanjutan. Indikator tersebut dapat mencakup keterlibatan dalam perencanaan, jumlah atau jenis kegiatan konservasi yang diikuti, keterlibatan dalam pengelolaan, akses terhadap pelatihan, manfaat ekonomi, serta tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengelola. Studi tentang konservasi mangrove di Bulukumba, misalnya, mengembangkan partisipasi melalui aspek kepedulian, keterlibatan, keterampilan, pendapatan, dan kepercayaan. Kerangka semacam ini dapat diadaptasi untuk mengevaluasi Bale Mangrove tanpa mengurangi karakter sosial lokal.

Selain itu, perlu ada mekanisme evaluasi berkala. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap jumlah pengunjung dan pendapatan, tetapi juga terhadap kondisi mangrove, sampah, fasilitas, kepuasan masyarakat, dan pembagian manfaat. Evaluasi partisipatif memungkinkan masyarakat memberikan masukan secara langsung dan membantu pengelola mengetahui masalah sebelum berkembang menjadi konflik. Dalam perspektif struktural fungsional, evaluasi berfungsi menjaga keseimbangan sistem; sedangkan dalam perspektif pemberdayaan, evaluasi merupakan ruang untuk memperkuat posisi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan.

Pengembangan produk lokal juga dapat diarahkan untuk memperkuat identitas ekologis Bale Mangrove. Produk seperti kopi mangrove, miniatur perahu, pakaian khas, makanan, atau kerajinan sebaiknya disertai narasi mengenai lingkungan dan sejarah lokal. Dengan demikian, kegiatan ekonomi sekaligus menjadi media edukasi. Strategi tersebut memungkinkan wisatawan membawa pengalaman ekologis dan sosial dari destinasi, sementara masyarakat memperoleh tambahan nilai ekonomi. Pengembangan produk juga perlu memperhatikan

kualitas, keberlanjutan bahan baku, kemasan, pemasaran, dan kemampuan pelaku usaha agar tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat.

Dari sisi promosi, partisipasi pemuda dapat dikembangkan melalui media digital, tetapi promosi perlu disertai informasi mengenai etika berkunjung dan aturan konservasi. Semakin mudah destinasi ditemukan, semakin penting pula informasi mengenai kapasitas kawasan dan perilaku wisatawan. Dengan cara ini, promosi tidak hanya mengejar jumlah kunjungan, tetapi membantu membentuk tipe kunjungan yang mendukung keberlanjutan. Pendekatan tersebut juga membuka ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan keterampilan komunikasi, dokumentasi, dan pemasaran tanpa meninggalkan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.

Secara keseluruhan, penguatan Bale Mangrove dapat diarahkan pada model tata kelola kolaboratif berbasis masyarakat: masyarakat sebagai aktor utama, pemerintah desa sebagai fasilitator, kelompok pengelola sebagai koordinator operasional, pemuda sebagai penggerak inovasi, pelaku usaha sebagai pengembang manfaat ekonomi, dan lembaga pendidikan atau mitra lain sebagai pendukung pengetahuan. Model tersebut tetap membutuhkan pembagian peran yang fleksibel karena kondisi destinasi dapat berubah. Prinsip utamanya adalah bahwa keputusan penting mengenai pemanfaatan kawasan, konservasi, dan distribusi manfaat harus dibangun melalui komunikasi dan partisipasi masyarakat.

Penguatan kapasitas juga perlu dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat. Pelatihan pengelolaan wisata dapat mencakup pelayanan pengunjung, pemanduan, kebersihan, keselamatan, pemasaran digital, pencatatan keuangan, dan konservasi mangrove. Pelatihan sebaiknya tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi diikuti praktik dan evaluasi. Dengan cara tersebut, masyarakat mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan pengelolaan ketika kondisi destinasi berubah dan ketika tuntutan wisatawan semakin beragam.

Keterhubungan antara konservasi dan ekonomi menjadi prinsip penting dalam keberlanjutan Bale Mangrove. Manfaat ekonomi dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk menjaga kawasan, sedangkan kondisi mangrove yang baik menjadi aset utama bagi keberlangsungan wisata. Hubungan ini membentuk siklus: lingkungan yang terpelihara meningkatkan daya tarik wisata; aktivitas wisata membuka manfaat ekonomi; manfaat tersebut memperkuat kepentingan masyarakat untuk menjaga lingkungan. Siklus tersebut hanya dapat berlangsung apabila pemanfaatan tidak melebihi daya dukung kawasan dan manfaat tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Karena sumber PDF yang tersedia belum memuat hasil penelitian secara lengkap, agenda penelitian berikutnya perlu memverifikasi siklus tersebut melalui data lapangan. Penelitian lanjutan dapat menggali pengalaman pengelola, pemuda, pemerintah desa, pedagang, dan warga yang tidak terlibat langsung. Wawancara juga dapat diarahkan untuk mengetahui bagaimana keputusan dibuat, bagaimana pendapatan dikelola, bagaimana konflik diselesaikan, dan bagaimana masyarakat menilai perubahan lingkungan. Data tersebut akan membuat analisis partisipasi Bale Mangrove lebih kuat secara empiris dan memungkinkan pengembangan rekomendasi kebijakan yang lebih spesifik.

Pengelolaan yang adaptif juga penting karena kawasan pesisir menghadapi perubahan lingkungan dan sosial. Pengelola perlu memantau kondisi vegetasi, kebersihan, fasilitas, arus kunjungan, dan tanggapan masyarakat secara berkala. Hasil pemantauan dapat menjadi dasar penyesuaian aturan dan program. Dengan

demikian, pengembangan Bale Mangrove dapat berlangsung secara bertahap tanpa mengabaikan fungsi ekologis mangrove sebagai aset utama destinasi. Pendekatan ini sekaligus memperkuat pembelajaran sosial masyarakat dalam mengelola sumber daya bersama. Pemantauan tersebut dapat dilakukan bersama masyarakat agar evaluasi sekaligus menjadi proses belajar dan penguatan tanggung jawab kolektif.

## KESIMPULAN

Rekonstruksi terhadap naskah sumber menunjukkan bahwa Bale Mangrove di Dusun Poton Bako dikembangkan melalui inisiatif lokal, terutama pemuda, yang kemudian diarahkan pada keterlibatan masyarakat yang lebih luas. Bentuk partisipasi yang dideskripsikan meliputi keterlibatan dalam pembangunan dan pemantauan, pengelolaan kawasan, aktivitas ekonomi, pelestarian mangrove, pendidikan, dan pengembangan produk wisata.

Strategi pelestarian yang relevan dalam naskah meliputi rehabilitasi mangrove, pengelolaan sampah, pendidikan dan peningkatan kesadaran, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, pengawasan, serta perlindungan satwa. Pengembangan wisata memberikan manfaat ekonomi melalui parkir, perdagangan, dan produk lokal, tetapi keberlanjutannya bergantung pada kelembagaan, distribusi manfaat, dan kesinambungan partisipasi.

Secara teoretis, perspektif struktural fungsional membantu melihat Bale Mangrove sebagai sistem sosial yang memerlukan koordinasi antarelemen. Namun, keberhasilan pengelolaan berbasis masyarakat perlu diukur bukan hanya dari keteraturan pembagian fungsi, tetapi juga dari ruang pengambilan keputusan, pemerataan manfaat, kapasitas konservasi, dan kemampuan masyarakat melakukan evaluasi secara berkelanjutan.

Keterbatasan utama artikel ini adalah PDF sumber yang tersedia tidak memuat bab hasil dan kesimpulan skripsi. Karena itu, artikel tidak mengklaim temuan lapangan yang tidak tercantum dalam dokumen. Untuk naskah jurnal yang akan benar-benar disubmit, bagian hasil perlu dilengkapi dengan transkrip atau ringkasan wawancara, jumlah dan karakteristik informan, hasil observasi, dokumentasi lapangan, serta bukti mengenai bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat.

## REFERENSI


Arrahmah, N., & Wicaksono, F. (2021). Dinamika partisipasi masyarakat dalam tata kelola ekowisata hutan mangrove Wana Tirta di Kabupaten Kulon Progo. Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation.

Asker, S., Boronyak, L., Carrard, N., & Paddon, M. (2010). Effective community based tourism: A best practice manual. Sustainable Tourism Cooperative Research Centre.

Handayani, T., et al. (2022). Partisipasi masyarakat dalam mendukung konservasi ekosistem mangrove di kawasan ekowisata Luppung, Kabupaten Bulukumba. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Murphy, P. E. (1988). Community approaches: Tourism and public policy. Routledge.

Nuraeni, E., & Kusum, Y. W. C. (2023). The role of community-based tourism for mangroves conservation in Banten, Indonesia. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya

Alam dan Lingkungan, 13(4), 606–612. https://doi.org/10.29244/jpsl.13.4.606-612

Pelenkahu, H., Rondonuwu, D. M., & Lakat, R. M. S. (2023). Partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata mangrove di Kecamatan Bunaken Kota Manado. Jurnal Bios Logos, 13(2). https://doi.org/10.35799/jbl.v13i2.47705

Rahmawati, D. A. M., & Cintamulya, I. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan ekowisata di Mangrove Center Kabupaten Tuban. Bioedukasi, 13(2).

Sari, N., Malik, A., & Maddatuang. (2020). Community participation in the development of the Saluleang mangrove tourism area in Bebanga Kelurahan Kalukku District, Mamuju Regency. UNM Geographic Journal, 4(1). https://doi.org/10.26858/ugj.v4i1.23440

Singgalen, Y. A. (2020). Mangrove forest utilization for sustainable livelihood through community-based ecotourism in Kao Village of North Halmahera District. Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 26(2), 155. https://doi.org/10.7226/jtfm.26.2.155

Suansri, P. (2003). Community based tourism handbook. Responsible Ecological Social Tour-REST.

Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Dermatoto, A. (2009). Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Sebelas Maret University Press.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif. Universitas Indonesia Press.

Aqilah, H. N., & Islam, D. (2024). Government policy, empowerment and community participation in sustainable tourism development in ecotourism mangrove Lembung Pamekasan. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 12(6). https://doi.org/10.37641/jimkes.v12i6.2987

Putri, A. R. E., Yasin, A., & Agustina, D. T. (2025). Literature analysis: Local community involvement in mangrove forest ecotourism management in Indonesia. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Tanaman, 4(1). https://doi.org/10.55606/jurrit.v4i1.6526

Integration of Community-Based Tourism (CBT) Index and Biophysical Assessment for Sustainable Ecotourism Mangrove: A Case Study of Karangsong, Indonesia. (2024). Sustainability, 16(7), 2806. https://doi.org/10.3390/su16072806